

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.
- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang : Setara Press, 2017.
- Arto, H.A. Mukti. *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jianayah*. Depok : Prenadamedia Group, 2018.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik: Keuangan Negara Pasca perubahan UUD 1945*. Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Christiawan, Rio. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok : Rajawali, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- FBA, Michael Freeman. *Llyoid's Introduction to Jurisprudence*. London : Thomson Reuters (Legal) Limited, 2014
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief B. Shidarta. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 2000.
- Leback, Karen. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung : Nusa Media, 2012.
- Lontoh, Rudy A & et. al (editor). *Hukum Kepailitan : Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni, 2001.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok : Rajagrafindo Persada, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia : Perspektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Nainggolan, Bernard. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Bandung : P.T Alumni, 2011.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2009.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Pengantar Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2019.
- Rawl, John. *A Theory of Justice*. penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Sadjijono. *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*, Surabaya : UGBHARA Press & LaksBang PRESSindo, 2016.

- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000.
- Sastrawidhajaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : PT. Alumni, 2010.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2014.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : CV. Nata Karya, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press: 2007.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*. Jakarta :PT Sofmedia, 2010.
- Suryabarata, Sumandi. *Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo, 1998.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Depok : Prenadamedia Goup, 2018.
- Suyatno, Anton. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok : Prenadamedia Group, 2017.

- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.
- Viswandro & et. al. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Wijaya, Andika. *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. *Hukum Acara Pengadilan Niaga Practical Guide To The Commercial Court*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Udiana, I Made. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*. Bali : Udayana University Press, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. LN RI: 1985-73; TLN: 3316
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. LN RI: 2004- 131; TLN: 4443
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN RI: 2009-157; TLN: 5076
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. LN RI: 2011- 111; TLN: 5253
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. LN RI: 2014- 337; TLN: 5618

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Jurnal

Hasan, Hasbi. “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 No 3, Oktober 2012.

Hidayat, Mochamad Rifki. “Kepastian Hukum Pemenuhan Upah Karyawan Dalam Pembagian Harta Pailit”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Voume 9. 2021.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*, Volume 1. 2019.

Kleden, Kristoforus Laga et al. “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 16. 2020.

Sailan, Manan. “Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40. 2011.

D. Website

Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum”. https://pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Inonesia.pdf, diakses pada 20 Agustus 2021.

Reza, Muhammad. *Kemanfaatan Hukum*, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>, diakses pada 21 Maret 2021.

Syafnidawati, *Perbedaan Metodologi Penelitian dan Metode Penelitian*, <https://raharja.ac.id/2020/10/26/perbedaan-metodologi-penelitian-dan-metode-penelitian/>, diakses pada 15 September 2021.

Tim JDIH BPK, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Asuransi*, 2020, https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/04/TH_-Fungsi-OJK-Dalam-Pengawasan-Perusahaan-Asuransi.pdf, diakses pada 10 November 2021.

Utami Argawati, *MK Bolehkan Upaya Hukum Kasasi bagi Putusan PKPU*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17869>, diakses pada 23 Desember 2021.

Yusril Ihza Mahendra, *Utilitarianisme Jeremy Bentham*, <https://www.iisau.org/2020/07/12/utilitarianisme-jeremy-bentham/>, diakses pada 05 September 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/selama-pandemi-covid-19-masih-ada-perkara-pkpu-diprediksi-akan-meningkat>, diakses tanggal 23 Maret 2021.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada 14 November 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses pada 05 September 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/debitur>, diakses pada 04 September 2021.

E. Sumber Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor: 071/PUU-II/2004 Perkara Nomor: 001-002/PUU-III/2005 perihal Uji Materil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. perihal Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi)

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 perihal pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 juncto Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Januari 2021 juncto Putusan PKPU Sementara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 perihal Uji Materil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta : 2018.

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP 84/DHMS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penjelasan Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna.